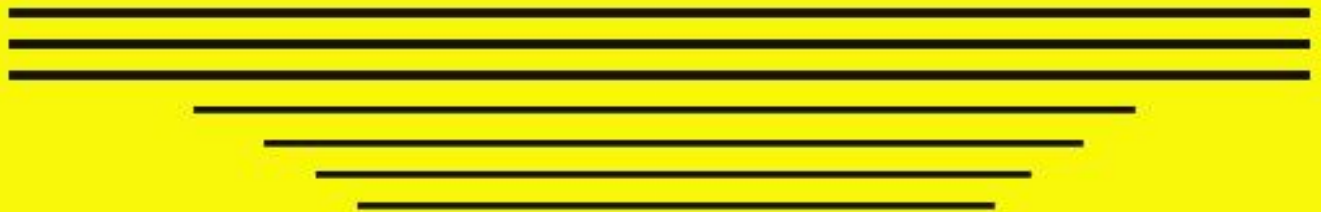


RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentunya membawa perubahan yang mendasar dalam menentukan arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dimasa mendatang. Sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sebagai dasar dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan, maka Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tersebut, sektor ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dilakukan dengan melalui pendekatan agribisnis dan ketahanan pangan. Pendekatan ini pada hakekatnya bermaksud meletakkan pertanian secara utuh dengan memperhatikan berbagai faktor penunjang. Melalui pendekatan ini diharapkan sektor pertanian dapat lebih meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama petani dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Dengan berdasarkan pola dasar pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Tengah dan Rencana Strategi 2021 –



2026 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah, serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka disusunlah Rencana Kerja 2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sektor Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Lampung Tengah selama satu tahun kedepan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah ini tersusun berkat bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih. Kiranya ini dapat bermanfaat dalam memberikan dukungan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala Dinas

JUMALI, SP.MIP
NIP. 19650930 199403 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN LALU	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
 III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 23
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	26
3.3 Program dan Kegiatan	27



IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	28
V. PENUTUP	33
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	34
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	34
5.3 Rencana Tindaklanjut	35

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tahun 2021 – 2022	9
2. Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan Tahun 2021-2022	10
3. Jumlah Lembaga Tani Tahun 2021 – 2022	11
4. Perkembangan peningkatan kemampuan kelompok tani Tahun 2021 – 2022.	11
5. Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian Tahun 2021– 2022	11
6. Situasi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022	13
7. Komposisi Pola Pangan Harapan	16
8. Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Tahun 2023	26
9. Indikator kinerja akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam lima tahun mendatang	104



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
2. Tabel T-C. 30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah
3. Tabel T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Lampung Tengah
4. Tabel T-C 32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah
5. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lampung Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun sebagai kelanjutan dari Renja Tahun 2023. Sehubungan dengan hirarki organisasi, Renja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2021– 2026) Kabupaten Lampung Tengah. Renja ini juga merupakan salah satu bagian terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan dari RKPD, Renstra SKPD, Renja Kementerian Pertanian RI, Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD berupa rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2024.

Renja disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun tersebut. Renja juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renja 2024 Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah merupakan dokumen yang memiliki kedudukan

yang strategis dan vital sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, karena merupakan dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja dan titik tolak bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai dokumen perencanaan formal instansi pemerintah, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah Periode 2024 mengacu kepada:

- a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- b Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- d Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- e Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- f Peraturan Menteri/Kepala Bappenas Nomor Kep.5/M.PPN/HK/OT/2021 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022
- g Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- h Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

- i Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- k Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- l Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124.
- m Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- n Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- p Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan
- q Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

-
- r Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
 - s Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80).
 - t Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - u Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - v Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - w Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 - x Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016.
 - y Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 - z Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 - aa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 17 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender
 - bb Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA)
-

-
- cc Keputusan Bupati No. 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD)
 - dd Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 29 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan selama satu tahun kedepan sebagai dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, bertujuan :

- a. Menyediakan pedoman atau acuan bagi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam merumuskan kebijakan, prioritas program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Tengah dan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pusat.
- b. Memberikan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura secara sinergis, koordinatif, dan terpadu serta berkelanjutan.
- c. Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Memberikan informasi tentang kondisi umum Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam konstelasi regional dan nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun lalu dan capaian renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (2) analisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan tentang (1) telaahan terhadap kebijakan nasional, (2) perumusan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, (3) program dan kegiatan.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang kaidah pelaksanaan renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Renja, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, serta catatan dan harapan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam Penyusunan Renja di tahun 2023, metodologi yang digunakan adalah dengan mengevaluasi pelaksanaan renja di tahun sebelumnya, yaitu dengan membandingkan hasil kinerja dan capaian yang diperoleh dengan indikator kinerja yang telah disepakati di tahun tersebut. Program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2021 diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian meliputi tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maka perlu adanya evaluasi pelaksanaan renja dan capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat dilihat pada Tabel evaluasi terhadap Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun lalu dan capaian Renstra tertuang dalam Tabel T-C..29. Berdasarkan table T-C. 29 dapat kita tarik kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 dari aspek realisasi anggaran sudah baik yaitu mencapai 88,06%. Sedangkan jika dilihat dari aspek ketercapaian target kinerja, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki predikat sangat baik dengan nilai 99,93%. Dan jika dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 memiliki predikat sangat baik dengan nilai 306%. Keberhasilan ini tidak lain dikarenakan adanya kerja sama yang solid antara pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan hortikultura serta peran serta stake holder terkait.

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

									tahun 2023	(% s/d Tahun 2023
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	100,00 %	100	300	300 %

		Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik	90	85	85	85	100,00 %	85	255	283 %
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	2	2	100,00 %	2	7	233 %
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	0	2	2	100,00 %	2	4	200 %

2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0	1	1	100,00 %	1	2	200 %
2 09 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	6	6	6	6	100,00 %	6	18	300 %

		Kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	0	0	0	0,00%	12	12	100 %
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi keuangan	12	12	12	12	100,00 %	12	36	300 %
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan dalam pemberian Gaji dan Tunjangan	12	12	12	12	100,00 %	12	36	300 %

		ASN								
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	3	3	3	100,00 %	3	9	300 %
2 09 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan danPenyiapan Bahan TanggapanPe meriksaan	3	0	3	3	100,00 %	3	6	200 %
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	6	0	6	6	100,00 %	6	12	200 %

		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase jumlah penyediaan kebutuhan layanan umum perangkat daerah	100	100	100	100	100,00 %	100	300	300 %
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	10	10	10	100,00 %	10	30	300 %

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024

2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8	6	8	8	100,00 %	8	22	275 %
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	16	3	3	100,00 %	3	22	733 %
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan logistik kantor	50	50	50	50	100,00 %	50	150	300 %
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	1000	1000	1000	1000	100,00 %	1000	300 0	300 %
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	3	0	3	3	100,00 %	0	3	100 %

		Disediakan								
2 09 01 2.06 09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	12	12	100,00 %	12	36	300 %
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah n daerah pada perangkat daerah	12	12	12	12	100,00 %	12	36	300 %

2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100,00 %	12	36	300 %
2 09 01 2.09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang mendapat pemeliharaa n	46	26	31	24	77,42 %	39	89	193 %
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	0	1	1	100,00 %	1	2	200 %

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024

2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	2	2	100,00 %	2	14	140 %
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	15	20	20	100,00 %	20	55	275 %
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1	1	1	1	100,00 %	1	3	300 %
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER	Persentase Desa Dengan Kemandirian Pangan	50	40	45	45	100,00 %	47	132	264 %

	DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN									
		Persentase Kampung yang telah memiliki lumbung pangan masyarakat	60	34	41	41	100,00 %	50	125	208 %
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	9	1	7	7	100,00 %	8	16	178 %

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024

2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang tersedia	9	1	7	7	100%	0	8	89 %
2 09 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Kebutuhan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang disediakan	14	7	1	1	100,00 %	0	8	57 %
2 09 03	PROGRAM PENINGKAT AN DIVERSIFI KASI DAN KETAHAN AN PANGAN MASYARA KAT	Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	80	31	50	50	100,00 %	70	151	189 %
		Persentase ketersediaan pangan	80	31	50	50	100,00 %	70	151	189 %
		Konsumsi Beras (Kg/Kapita/	106,4783	108,0919	107,554	107,554	100,00 %	107,016 1	322, 662	303 %

		Thn)								
		Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur (Kg/Kapita/Thn)	83,61868	76,99112	79,20031	79,20031	100,00 %	81,4095	237,60093	284 %
		Konsumsi Kelompok Pangan Hewani (Kg/Kapita/Thn)	52,65634	50,38019	51,13891	51,13891	100,00 %	51,89763	153,41673	291 %
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	95	85	90	90	100,00 %	90	265	279 %

	rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan									
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	1	10	10	100,00 %	0	11	110 0%
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	10	7	21	21	100,00 %	21	49	490 %
2 09 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan	Jumlah koordinasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	7	5	0	0	0,00%	0	5	71 %

	Lainnya									
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah lokasi daerah yang dipantau	15	15	15	15	100,00 %	15	45	300 %
2.09.0 3.2.01 .05	Pengembang an Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	jumlah peserta yang mengikuti	45	30	0	0	0,00%	0	30	67 %
2 09 03 2.01 06	Pengembang an Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangk an	5	8	8	8	100,00 %	8	24	480 %

2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disediakan	30	20	30	22	73,33 %	30	72	240 %
2 09 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten	12	7	7	7	100,00 %	0	14	117 %
2 09 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	14	14	14	14	100,00 %	14	42	300 %
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	30	20	30	22	73,33 %	15	57	190 %

2 09 03 2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase penentuan harga minimum daerah pangan lokal	50	28,6	28,6	28,6	100,00 %	35,71	92,9 1	186 %
2 09 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok lokal	14	8	4	4	100,00 %	0	12	86 %
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	Persentase pelaksanaan target konsumsi pangan	90	85	90	90	100,00 %	90	265	294 %

	Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	perkapita pertahun								
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	1	1	1	1	100,00 %	1	3	300 %
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	2	4	4	100,00 %	4	10	250 %

2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi per kapita pertahun	12	10	2	2	100,00 %	2	14	117 %
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Rawan Pangan	35,71	25	28	28	100,00 %	28	81	227 %
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang disusun	1	1	1	1	100,00 %	1	3	300 %
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	0	1	1	100,00 %	1	2	200 %

	Kerentanan Pangan									
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kampung rentan pangan yang ditangani	12	10	10	10	100,00 %	10	30	250 %
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten	12	2	10	10	100,00 %	10	22	183 %
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	95	90	90	90	100,00 %	95	275	289 %

2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	9	9	9	9	100,00 %	9	27	300 %
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/K ota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/K ota yang Dibina	12	7	10	10	100,00 %	10	27	225 %
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	12	10	10	12	120,00 %	10	32	267 %

2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten	12	3	27	02	7,41%	8	13	108 %
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Presentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi & cabai)	10	4	6	6	100,00 %	8	18	180 %
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	6	3	4	4	100,00 %	5	12	200 %

3 27 03 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	28	28	28	28	100,00 %	28	84	300 %
3 27 04 2.01 02	Pendampinga n Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampinga n Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	96	58	84	84	100,00 %	90	232	242 %
3 27 03	PROGRAM PENYEDIA AN DAN PENGEMB ANGAN PRASARAN A PERTANIA N	Persentase prasarana yang digunakan	99,96	99,96	99,96	99,96	100,00 %	99,96	299, 88	300 %

3 27 03 01	Pengembang an Prasarana Pertanian	Persentase lahan sawah yang terdata	100	43,3	62,9	62,9	100,00 %	82,5	188, 7	189 %
3 27 03 01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/LP2B, Kawasan PertanianPan gan Berkelanjuta n/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuta n/LCP2B yang dikelola	12000	15000	12500	12500	100,00 %	15000	425 00	354 %
3 27 03 01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	5	0	5	5	100,00 %	5	10	200 %

		lainnya								
3 27 03 02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase lahan sawah yang terairi	87,3	86,3	86,6	86,6	100,00 %	87	259,9	298 %
3 27 03 02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	5	8	4	3	75,00 %	5	16	320 %
3 27 03 02 02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	3	0	0	0,00%	3	6	300 %

3 27 03 02 03	Pembanguna n,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	3	4	4	100,00 %	2	9	450 %
3 27 03 02 04	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembanguna n, Rehabiitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	5	5	0	0	0,00%	5	10	200 %
3 27 03 02 08	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungny a	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungny a yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5	0	0	0	0,00%	5	5	100 %
3 27 03 02 05	Pembanguna n, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun,	19	7	7	7	100,00 %	19	33	174 %

	Prasarana Pertanian Lainnya	Direhabilitasi dan Dipelihara								
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	11,77	12,02	11,9	11,9	100,00 %	11,83	35,75	304 %
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	31,33	22,98	25,07	25,07	100,00 %	28,2	76,25	243 %
3 27 05 01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Luas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	2000	1000	1400	1400	100,00 %	1700	4100	205 %

	Hortikultura, dan Perkebunan	Pangan dan Hortikultura								
3 27 07 01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura	1000	1000	0	0	0,00%	1000	200 0	200 %
3 27 07 01 05	Penanggulan gan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Luas Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan dan Hortikultura	1000	0	0	0	0,00%	1000	100 0	100 %

3 27 07	PROGRAM PENYULU HAN PERTANIA N	Presentase peningkatan kapasitas kelembagaa n penyuluh	4,5	4,1	4,5	4,5	100,00 %	4,5	13,1	291 %
3.27.0 7.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	0,75	0,75	0,75	0,75	100,00 %	0,75	2,25	300 %
3 27 07 01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	50	50	50	50	100,00 %	50	150	300 %
3 27 07 01 02	Pengembang an Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya	200	74	200	200	100,00 %	200	474	237 %

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024

3 27 07 01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya	28	28	28	28	100,00 %	28	84	300 %
3 27 07 01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah BUMS yang dibentuk	10	10	0	0	0,00%	10	20	200 %
3 27 07 01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	24	24	24	20	83,33 %	24	68	283 %
	TOTAL		17899	18612	15673	15637	99,77 %	20459	54708	306 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Secara umum keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada table T-C.30. Berdasarkan table tersebut diperoleh data bahwa ada beberapa indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang melebihi target dan ada juga yang di bawah target. Indikator Kinerja Skor PPH Konsumsi dan Presentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Sedangkan untuk Rasio Ketersediaan Pangan Utama tercapai 57,98%. Ketidak tercapaian ini disebabkan oleh adanya pengalihan lahan sawah yang harusnya ditanam padi dialihkan pada tanaman jagung dan singkong. Selain itu juga disebabkan oleh adanya organisme pengganggu tanaman, dan sarana prasarana yang belum maksimal. Sehingga produktivitas padi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan tingkat produksi padi tahun lalu, tonase yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 489.448 ton padi (281.360 ton beras) menjadi 540.115 ton padi (310.487 ton beras).

Indikator kinerja selanjutnya yaitu Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura. Jumlah produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada jumlah produksi beberapa komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dicapai pada tahun 2022. Belum tercapainya target produksi jagung dipengaruhi oleh serangan hama (tikus) sehingga produksi jagung belum mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun demikian bila dibandingkan dengan produksi jagung di tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan (18,84 %) yaitu dari 515.595, 85 ton menjadi 612.758,75 ton

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Sasaran Strategis	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Konsumsi)	-	Skore PPH	86,7	89	89,3	90	88,9	89	89,3	90	
		Presentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji (Persen)	-	-	80	85	85	90	80	85	85	90	
		Rasio Ketersediaan	-	-	391,65	401,77	407,65	408,00	227,07	401,77	407,65	408,00	

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024

		pangan Utama (kg/pend/thn)											
	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura :	Jumlah produksi komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura :	-	-									
		Padi (ton)	-	-	602.591	606,135	609,699	613,285	540.115	606,135	609,699	613,285	
		Jagung (ton)	-	-	655.09	655.09	655.09	655.09	612.758,	655.09	655.09	655.09	

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024

					4	4	4	4	75	4	4	4	
		Ubi kayu (ton)	-	-	2.981. 460	2.981. 460	2.981. 460	2.981. 460	2.611.19 4,70	2.981. 460	2.981. 460	2.981. 460	
		Cabe besar (ton)	-	-	4.750, 07	4.750, 07	4.750, 07	4.750, 07	2.685,75	4.750, 07	4.750, 07	4.750, 07	
		Bawang merah (ton)	-	-	49,5	60	65	65	186,31	60	65	65	
		Jamur (ku)	-	-	450	450	450	450	469,15	450	450	450	
	Meningka tnya nilai tambah tanaman pangan dan hortikultu ra	Persentase pertumbuhan PDRB subsektor tanaman pangan	-	Kontri busi sektor pertani an, kehuta nan perikan an terhada p	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	

				PDRB									
		Persentase pertumbuhan PDRB subsektor tanaman hortikultura	-	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan perikanan terhadap PDRB	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	
	Meningkatkan tata kelola manajemen internal	Nilai SAKIP Dinas Pertanian TPH hasil penilaian Inspektorat	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024

	Dinas Pertanian TPH Lampung Tengah												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produksi komoditas padi juga belum mencapai target yang telah ditentukan. Target yang dicapai baru mencapai 72,87%. Hal ini dikarenakan irigasi yang belum optimal, adanya organisme pengganggu tanaman dan pengalihan lahan sawah menjadi lahan pertanian lainnya. Meskipun demikian produksi padi tahun ini mengalami peningkatan sebesar 10.35 %. Produksi padi pada tahun 2021 sebesar 489.448 ton dan 2022 sebesar 540.115 ton. Begitu juga dengan produksi Ubi kayu mengalami peningkatan sebesar 18,23%. Produksi Ubi Kayu pada tahun 2021 sebesar 2.208.519,48 ton dan 2022 sebesar 2.611.194,70 ton. Secara rinci perkembangan jumlah produksi beberapa komoditas tanaman pangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tahun 2021 – 2022

No	KOMODITAS	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (Ton)	
		2021	2022*	2021	2022*	2021	2022*	2021	2022*
1.	Padi	112.026,00	104.695,41	100.291,00	101.743,00	48,92	53,09	489.448,00	540.115,00
2.	Jagung	76.499,60	78.891,00	69.229,30	82.758,00	62,45	74,04	515.595,85	612.758,75
3.	Ubi Kayu	65.159,06	98.888,00	77.038,10	91.145,00	247,39	286,49	2.208.519,48	2.611.194,70

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Tengah

Ket : *): Angka Sementara DKPTPH Lampung Tengah

Pada tahun 2022 jumlah produksi komoditas tanaman hortikultura unggulan mengalami penurunan. Cabe besar menurun sebesar 41,31 persen dari 45.766,69 Ku ditahun 2021 menjadi 26.857,51 Ku di tahun 2022. Sedangkan untuk produk cabe kecil, bawang merah, dan nanas mengalami peningkatan. Cabe kecil produksinya meningkat 15,59% dari 5.677,97 Ku di tahun 2021 menjadi 6.563,15 Ku di tahun 2022.

Produksi bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 1.116,92% dari 153,10 Ku di tahun 2021 menjadi 1.863,10 Ku di tahun 2022. Produksi nanas mengalami peningkatan sebesar 24,67% dari 305.119,78 Ku di tahun 2021 menjadi 380.403,63 Ku di tahun 2022. Sedangkan untuk produksi jamur mengalami penurunan sebesar 6,03% dari 4.992,04 Ku di tahun 2021 menjadi 4.691,15 Ku di tahun 2022. Menurunnya produksi unggulan hortikultura ini dipengaruhi oleh :

1. Pengalihan lahan cabe besar menjadi lahan cabe kecil dan bawang merah sehingga luas tanam mengalami penurunan
2. Sistem budidaya masih dilakukan secara tradisional
3. Penerapan GAP / SOP budidaya belum optimal.
4. Penanganan pasca panen masih rendah dan belum optimal menyebabkan daya saing produk lemah. Masih terbatasnya dukungan infrastruktur pasca panen (gudang pasca panen).

Secara rinci perkembangan luas tanam, luas panen dan produksi komoditas tanaman hortikultura tahun 2021 – 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Pencapaian Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Tanaman Hortikultura Unggulan Tahun 2021-2022

No.	KOMODITAS	Luas Tanam (Ha)		Luas Panen (Ha)		Produksi (Ku)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Cabe besar	657,75	483,00	752,75	588,75	45.766,69	26.857,51
2.	Cabe kecil	162,00	238,00	217,00	272,00	5.677,97	6.563,15
3.	Bawang merah	19,00	31,75	12,00	27,25	153,10	1.863,10
4.	Nanas petani	70,00	215,00	363,18	345,96	305.119,78	380.403,63
5.	Jamur	6,52	1,65	6,48	1,62	4.992,04	4.691,15

Sumber : Dinas Pertanian TPH Kabupaten Lampung Tengah (Angka Sementara)

Tidak terdapatnya realisasi persentase pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dikarenakan tidak

tersedianya data tersebut di Badan Pusat Statistik dipengaruhi oleh berubahnya metoda perhitungan dan sajian data di BPS itu sendiri. Tercapainya nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan membaiknya tata kelola manajemen internal Dinas Pertanian TPH.

Selain hal-hal tersebut di atas, keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pertanian melibatkan penyuluh pertanian yang berjumlah 246 orang terdiri dari penyuluh PNS, THL-TB dan swakarsa yang memberikan pembinaan dengan latihan dan kunjungan kepada 1.142 kelompok yang mendapatkan bantuan program dan kegiatan serta partisipasi lembaga tani yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 6.624 kelompok yang terdiri dari unsur kelompok tani, gapoktan, KEP, P3A, GP3A, UPJA dan kelompok penangkar benih.

Tabel 3. Jumlah Lembaga Tani Tahun 2021 – 2022

No	Lemba ga tani	2021	2022
1	Jumlah Kelompok Tani	5.131	5.164
2	Jumlah Gapoktan	331	331
3	Jumlah KEP	69	63
4	Jumlah P3A	273	291
5	Jumlah GP3A	24	24
6	Jumlah UPJA	117	119
7	Jumlah kelompok penangkar benih	45	45
8	Jumlah Kelompok Tani Yang mendapat Bantuan dari Pemerintah	1.142	1.142

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 4. Perkembangan peningkatan kemampuan kelompok tani
Tahun 2021 – 2022

No.	Kelompok Tani	2021	2022
1	Pemula	2.825	2.858
2	Lanjut	1.874	1.874
3	Madya	422	422
4	Utama	10	10
	Jumlah Kelompok Tani	5.131	5.164

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 5. Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian Tahun 2021– 2022

No.	Jumlah penyuluh	2021	2022
1	PNS	98	93
2	THL-TB	123	52
3	PPPK	0	71
	JUMLAH	221	216

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 6. SITUASI KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022

No	Komoditas	Produksi (ton)	Benih/Pakan Tercecer		Ketersediaan (TON)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Komsumsi Kapita (Kg/Kap/Thn)	Total Komsumsi (ton)	Surplus/Minus Ketersediaan (Ton)	Ketersediaan/ Komsumsi %
			%	(ton)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Padi (GKG)	489.448	7,3	35.730	452.087	1.500.022	78,12	117.182	334.906	385,80
	Beras	458.042	1,3	5.955						
	Jagung	515.596	11,0	56.716						
2	Kedelai	77	5,0	4	73	1.500.022	0,01	15	58	487,66
4	Kacang Tanah	414	5,0	21	393	1.500.022	0,12	180	213	218,50
5	Kacang Hijau	236	7,0	17	219	1.500.022	0,28	420	(201)	52,26
6	Ubi Kayu	2.208.519	15,0	331.278	1.877.241	1.500.022	4,68	7.020	1.870.221	26740,93
7	Ubi Jalar	1.832	12,0	220	1.612	1.500.022	2,04	3.060	(1.448)	52,68
8	Buah-buahan	80.387	10,0	8.039	72.348	1.500.022	16,29	24.435	47.913	296,08
9	Sayuran	864	10,0	86	778	1.500.022	87,32	130.982	(130.204)	0,59
10	Daging	11.996	5,0	600	11.996	1.500.022	5,57	8.355	3.641	143,58
11	Susu	-	5,7	-	-		0,48		(720)	0,00

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024

						1.500.022		720		
12	Telur	33.320	3,9	1.299	32.021	1.500.022	11,26	16.890	15.130	189,58
13	Ikan	41.532	15,0	6.230	35.302	1.500.022	12,62	18.930	16.372	186,49
14	Gula	526.902			526.902	1.500.022	6,90	10.350	516.552	5090,77
15	Minyak Goreng/cpo	198.803			198.803	1.500.022	22,95	34.426	164.377	577,49

Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Peternakan/Perikanan dan Dinas Perkebunan/Kehutanan (Diolah Kembali)

Keterangan data () Menunjukkan Minus

Berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan, ketersediaan pangan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 untuk kelompok pangan ;

- Padi-padian untuk ketersediaan pangan pemenuhan kebutuhan penduduk melebihi target kebutuhan, untuk beras surplus 334.906 ton dari sisi ketersediaan dan jagung 458.700 ton. Ketersediaan padi-padian di Kabupaten Lampung Tengah tidak bermasalah dan surplusnya didistribusikan keluar Kabupaten Lampung Tengah.
- Makanan berpati, untuk ketersediaan pangan pemenuhan kebutuhan penduduk, untuk ubi jalar minus 1.448 ton dan ubi kayu 1.870.221 ton.
- Gula untuk ketersediaan pangan pemenuhan kebutuhan penduduk khususnya gula pasir mengalami surplus sebesar 516.552 ton yang di peroleh dari perkebunan tebu di kabupaten lampung tengah.
- Buah biji berminyak untuk ketersediaan pangan penduduk untuk kacang tanah lepas kulit terjadi surplus produksi sebanyak 213 ton, begitu pula kedelai terjadi kelebihan produksi 58 ton. Sehingga kelebihanannya di ekspor keluar kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan kacang hijau terjadi kekurangan produksi untuk konsumsi sebanyak 201 ton sehingga diperlukan pasokan dari luar kabupaten lampung tengah (impor).
- Buah-buahan; untuk ketersediaan pangan buah-buahan berlebih untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk dan terjadi kelebihan sebanyak 47.913 ton yang diekpor keluar kabupaten lampung tengah.
- Sayur-sayuran; untuk ketersediaan pangan sayur-sayuran untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk terjadi kekurangan ketersediaan sebanyak 130.204 ton. Sehingga diperlukan pasokan dari luar kabupaten lampung tengah.
- Daging; untuk ketersediaan pangan berlebih untuk pemenuhan konsumsi lampung tengah dan terjadi kelebihan ketersediaan sebanyak 3.641 ton.
- Telur; untuk ketersediaan pangan telur berlebih untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk karena terjadi kelebihan produksi telur sebanyak 15.130 ton dan diekspor keluar kabupaten lampung tengah.

- Ikan; ketersediaan pangan ikan berlebih untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk lampung tengah, dan terjadi kelebihan produksi ikan sebanyak 16.372 ton dan diekspor keluar kabupaten lampung tengah.
- Minyak dan lemak; untuk ketersediaan pangan minyak dan lemak berlebih untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk dan terjadi kelebihan ketersediaan sebanyak 164.377 ton dan diekspor keluar kabupaten lampung tengah.

Tabel 7. Komposisi Pola Pangan Harapan

No	Kelompok Pangan	Tahun		Keterangan
		Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Padi-padian	25,0	25,0	Tidak Bermasah
2.	Umbi-umbian	1,7	2,5	Tidak Bermasalah
3.	Pangan hewani	18,5	20,0	Tidak Bermasalah
4.	Minyak dan lemak	5,0	5,0	Tidak Bermasalah
5.	Buah Biji Berminyak	1,0	1,0	Tidak Bermasalah
6.	Kacang-kacangan	5,9	0,3	Tidak Bermasalah
7.	Gula	2,2	2,5	Tidak Bermasalah
8.	Sayuran dan buah	28,3	30,0	Tidak Bermasalah
9.	Lain-lain	0,00	0,00	Tidak Bermasalah
Total		87,5	86,31	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan tidak terlepas dari lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh serta dapat mendukung

terhadap pelaksanaan tugas. Hal ini mengingatkan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait menyebabkan kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura sudah sangat baik. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mampu berkontribusi untuk mendukung misi ke-3 Bupati Lampung Tengah yaitu meningkatkan Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan (Petani Berjaya). Tidak hanya memiliki kontribusi yang baik di tingkat Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura juga unjuk gigi di kancah Propinsi dan Nasional dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai sehingga membawa nama harum Bupati Lampung Tengah. Adapun prestasi-prestasi tersebut diantaranya

1. Juara I Lomba Cerdas Cermat Kelompok Tani Tingkat Nasional tahun 2022 An. Kelompok Tani Gapsera Sejahtera Mandiri Kec. Seputih Raman
2. Terbaik I Tingkat Provinsi Sebagai Petugas Data Statistik Hortikultura Tahun 2022 An. Bagus Juni Purnomo, S.TP
3. Peringkat I Kategori BPP Terbaik Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. BPP Kec. Sendang Agung.
4. Peringkat I Kategori Penyuluh Pertanian Terbaik Se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. Alfonsus Winarso.
5. Peringkat I Kategori Kios Terbaik Se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. Gapoktan Karya Mandiri.
6. Kategori Kelompok Tani Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura Terbaik Se-Provinsi Lampung Dalam Rangka Lomba Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) Award Tahun 2022 An. Kelompok Tani Sari Bumi.

-
7. Peringkat III Kategori Penyuluh Pertanian Terbaik Se-Provinsi Lampung An. Susilo.
 8. Penyuluh Pertanian Berprestasi Tingkat Nasional a.n. Retno Sawitri, SP. (PPL) Tahun 2021
 9. Gapoktan Berprestasi Juara 1 Tingkat provinsi a.n. Usaha Tani Tahun 2021
 10. Petani Berprestasi Juara II Tingkat Provinsi a.n. Amin Rosidin (Petani) pada Tahun 2021
 11. Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi juara II Tingkat Provinsi a.n. KWT Melati Putih pada Tahun 2021
 12. Penyuluh Pertanian Berprestasi Juara III Tingkat Provinsi a.n. Nuryati, SP. (PPL) Tahun 2021
 13. Juara 2 nasional produktivitas kedelai a.n. kelompok tani Rukun Makmur 1, Kampung Bumi Nabung Ilir, Kecamatan Bumi Nabung Tahun 2022
 14. Juara 1 Tingkat Provinsi Produktivitas GKG a.n. Kelompok Tani Usaha Bersama IV Kampung Cimarias Kecamatan Bangun Rejo Tahun 2022
 15. Juara 2 Tingkat Provinsi Produktivitas Jagung Tongkol Basah/Kering Panen a.n. Kelompok Tani Periangen Jaya Kampung Riau Periangen Kecamatan Pubian tahun 2022
 16. Juara Harapan I Tingkat Provinsi a.n. KWT Sekar Arum, kp. Rejo Asri, kec. Sep Raman Tahun 2021
 17. Nominasi Juara 4 Tingkat Nasional Produktivitas Jagung Tongkol Basah/Kering Panen a.n. Kelompok Tani Periangen Jaya Kampung Riau Periangen Kecamatan Pubian Tahun 2022

A. Halangan

Capaian kinerja yang baik dan banyaknya prestasi yang diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura bukan berarti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak ada halangan atau tantangan. Tantangan yang dihadapi juga cukup besar. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura diantaranya :

1. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
2. Menurunnya kualitas sumber daya lahan
3. Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia
4. Tingginya biaya agroinput (sarana produksi pertanian)
5. Menurunnya minat generasi muda terhadap usaha tani
6. Daya saing produk hortikultura masih rendah
7. Keterlambatan penyediaan pupuk bersubsidi
8. Perubahan iklim yang ekstrem mempengaruhi pola tanam dan serangan hama / penyakit.

B. Peluang

Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura, antara lain :

1. Komitmen dari Kepala Daerah bahwa sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai sektor unggulan.
2. Adanya permintaan pasar akan produk tanaman pangan dan hortikultura terutama produk olahan pangan lokal dari Kelompok Wanita Tani (KWT).
3. Dukungan lembaga keuangan untuk pengembangan usaha dan pembiayaan pertanian

Faktor-faktor diatas merupakan peluang yang mendukung pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan dengan adanya peluang-peluang tersebut Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanannya.

C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan, penurunan kualitas lahan, dan diperburuk oleh dampak perubahan iklim global.
2. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.
3. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan dan meningkatnya beban produksi tanaman bahan pangan.
4. Tingkat aplikasi teknologi tepat guna/anjuran yang belum optimal di tingkat petani.
5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usaha tani;
6. Tingginya ketergantungan terhadap penggunaan pupuk kimia;
7. Masih rendahnya harga yang diterima petani, terutama pada masa panen raya, sehingga tidak mendorong petani untuk berproduksi;
8. Persaingan pemanfaatan lahan dengan tanaman semusim lainnya;
9. Tataniaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.
10. Meningkatnya serangan OPT akibat pola tanam monokultur yang terus menerus dan penggunaan pestisida yang tidak sesuai dosis anjuran.

11. Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.
12. Konsumsi energi sebagian besar dari padi-padian dan bias ke beras.
13. Kelembagaan pemasaran belum mampu berperan baik sebagai penyangga kestabilan distribusi maupun harga pangan. Pada masa panen, pasokan pangan berlimpah kepasar sehingga menekan harga produk pertanian dan mengurangi keuntungan usaha tani. Sebaliknya pada masa paceklik atau masa dimana panen tidak berhasil, harga meningkat dengan tajam, sehingga mengurangi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
14. Keamanan jalur distribusi dan adanya pungutan sepanjang jalur distribusi dan pemasaran, mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan.
15. Adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi bukan hanya di Indonesia akan tetapi di seluruh dunia sehingga menyebabkan semua aspek dari pangan, pendidikan, kesehatan, industri cukup terganggu.
16. Sistem Perbenihan yang kurang berjalan optimal.
17. Kualitas produk tanaman yang dihasilkan petani belum sepenuhnya memenuhi standar pabrik pakan.
18. Persaingan Produk Pertanian dengan Produk Impor.
19. Sumber daya ditingkat UPT Dinas yang terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu instrument untuk menyusun Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Kerja (Renja) berfungsi juga sebagai sarana peningkatan kinerja pemerintah daerah dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, sedangkan RKPD digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. RKPD juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh pemangku kepentingan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table T-C.31 dibawah ini

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN		Persentase Desa Dengan Kemandirian Pangan			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN		Persentase Desa Dengan Kemandirian Pangan			

	RIAN PANGAN					RIAN PANGAN					
			Persentase Kampung yang telah memiliki lambung pangan masyarakat					Persentase Kampung yang telah memiliki lambung pangan masyarakat			
1.1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandiri an Pangan sesuai Kewenanga		Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang disediakan			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandiri an Pangan sesuai Kewenanga					

	n Daerah Kabupaten/ Kota					n Daerah Kabupaten/ Kota					
1.1. 1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	7 Unit	Rp 9.000.000. 000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	-	Rp -	
1.1. 2	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandiria n Pangan Lainnya		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	14 kecam atan	Rp 480.756.0 00	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandiria n Pangan Lainnya		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-	Rp -	

2	PROGRA M PENINGK ATAN DIVERSIF IKASI DAN KETAHAN AN PANGAN MASYAR AKAT		Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)			PROGRA M PENINGK ATAN DIVERSIF IKASI DAN KETAHAN AN PANGAN MASYAR AKAT		Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)			
			Persentase ketersediaan pangan					Persentase ketersediaan pangan			
			Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Tahun)					Konsumsi Beras (Kg/Kapita/Tahun)			

			Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur (Kg/Kapita/Tahun)					Konsumsi Kelompok Pangan Buah dan Sayur (Kg/Kapita/Tahun)			
			Konsumsi Kelompok Pangan Hewani (Kg/Kapita/Tahun					Konsumsi Kelompok Pangan Hewani (Kg/Kapita/Tahun			

2.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah			
-----	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

2.1.1	Penyediaan		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Rp 210.000.00	Penyediaan		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Rp 134.410.00	
2.1.2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 lokasi	Rp 91.500.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 lokasi	Rp 91.210.500	
2.1.3	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	5 lembaga	Rp 578.500.00	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	7 lembaga	Rp 51.928.000	

	Indonesia					Indonesia					
2.2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah CCP (Cadangan Pangan Pemerintah) yang disediakan (Beras)			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah CCP (Cadangan Pangan Pemerintah) yang disediakan (Beras)			
2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian		Jumlah Koordinasi danSinkronisasi PengendalianCadangan PanganKabupaten/K	12 kali	Rp 161.300.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian		Jumlah Koordinasi danSinkronisasi PengendalianCadangan PanganKabupaten/K		Rp -	

	CadanganPa ngan Kabupaten/ Kota		ota			CadanganPa ngan Kabupaten/ Kota		ota			
2.2. 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	14 lapora n	Rp 267.500.0 00	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	14 lapor an	Rp 73.492.00 0	
2.2. 3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Ton	Rp 475.000.0 00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	Rp 97.021.00 0	

2.3	Pelaksanaa n Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase pelaksanaan Target Konsumsi pangan perkapita pertahun			Pelaksanaa n Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Persentase pelaksanaan Target Konsumsi pangan perkapita pertahun			
2.3. 1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Doku men	Rp 271.400.0 00	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Doku men	Rp 135.008.0 00	

	Kapita Per Tahun					Kapita Per Tahun					
2.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 kelompok	Rp 280.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 kelompok	Rp 92.043.000	

2.3. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	12 kali	Rp 612.500.0 00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	2 kali	Rp 89.238.80 0	
3	PROGRA M PENANGA NAN KERAWA NAN PANGAN		Persentase daerah rentan rawan pangan			PROGRA M PENANGA NAN KERAWA NAN PANGAN		Persentase daerah rentan rawan pangan			

3.1	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan		Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang disusun			Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan		Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang disusun			
3.1.1	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Doku men	Rp 117.500.00	Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Doku men	Rp 43.938.000	

3.2	Penanganana n Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Kampung Rentan Rawan Pangan yang ditangani			Penanganana n Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Kampung Rentan Rawan Pangan yang ditangani			
3.2. 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 kali	Rp 320.675.0 00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5 kali	Rp 76.294.00 0	

4	PROGRA M PENGAW ASAN KEAMAN AN PANGAN		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			PROGRA M PENGAW ASAN KEAMAN AN PANGAN		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan			
4.1	Pelaksanaa n Pengawasa n Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah sampel pangan segar yang diawasi			Pelaksanaa n Pengawasa n Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah sampel pangan segar yang diawasi			

			Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan pangan segar yang disusun					Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan pangan segar yang disusun			
4.1.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		KelembagaanKeaman anan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	12 kelom pok	Rp 395.700.0 00	Penguatan Kelembagaa n Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		KelembagaanKeam anan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	10 lemb aga	Rp 39.495.00 0	
4.1.2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	12 kecam atan	Rp 110.500.0 00	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan		Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	10 keca mata n	Rp 40.095.00 0	

	Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten/Kota			Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten/Kota			
4.1. 3	Penyediaan Sarana danPrasaran a Pengujian Mutudan Keamanan PanganSega r Asal TumbuhanD aerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Sarana danPrasarana Pengujian Mutudan Keamanan PanganSegar Asal TumbuhanDaerah Kabupaten/Kota	12 lokasi	Rp 325.400.0 00	Penyediaan Sarana danPrasaran a Pengujian Mutudan Keamanan PanganSega r Asal TumbuhanD aerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Sarana danPrasarana Pengujian Mutudan i Keamanan PanganSegar Asal TumbuhanDaerah Kabupaten/Kota	5 lokas 0	Rp 50.968.50 0	

5	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku			PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku			
			Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik					Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik			

5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia			
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 3.500.000	

5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 4.760.000	
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.760.000	

5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 4.030.000	
5.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 kali	Rp 5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 kali	Rp 2.100.000	
5.2	Administrasi Keuangan		Cakupan Layanan administrasi Keuangan yang			Administrasi Keuangan		Cakupan Layanan administrasi Keuangan yang			

	Perangkat Daerah		tersedia			Perangkat Daerah		tersedia			
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan dalam Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Rp 20.831.601.917	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan dalam Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	Rp 25.184.976.689	
5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 jenis	Rp 3.805.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 jenis	Rp 3.550.976.000	
5.2.3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp 3.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp 3.000.000	

5.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Rp 3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Rp 4.414.000	
5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum yang terfasilitasi			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum yang terfasilitasi			

5.3. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 10.000.00 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene- rangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.850.000	
5.3. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap- an Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 246.500.0 00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap- an Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 90.314.00 0	
5.3. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp 11.000.00 0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Rp 3.417.700	

5.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 190.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 123.009.800	
5.3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp 50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp 28.845.000	
5.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 380.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 189.070.000	

5.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Persentase Ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Persentase Ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
5.4. 1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapor an	Rp 400.000.0 00	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapo ran	Rp 396.300.0 00	

5.5	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan			Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mendapat pemeliharaan			
5.5. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 45.000.00 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 41.670.00 0	

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2024

	Jabatan					Jabatan					
5.5. 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp 75.000.00 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp 107.160.0 00	

	Lapangan					Lapangan					
5.5.3	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Rp 80.500.000	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Rp 40.600.000	
5.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 24.590.000	

6	PROGRA M PENYEDI AAN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANI AN		Persentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi dan cabai)			PROGRA M PENYEDI AAN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANI AN		Persentase peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama (padi dan cabai)			
6.1	Pengawasa n Penggunaa n Sarana Pertanian		Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian			Pengawasa n Penggunaa n Sarana Pertanian		Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian			

6.1.1	Pengawasan 1 Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	28 lokasi	Rp 102.076.4 16	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	28 lokasi	Rp 44.732.45 0	
6.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	96 kali	Rp 968.380.1 22	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	90 kali	Rp 323.903.1 20	

7	PROGRA M PENYEDI AAN DAN PENGEMB ANGAN PRASARA NA PERTANI AN		Persentase prasarana yang digunakan			PROGRA M PENYEDI AAN DAN PENGEMB ANGAN PRASARA NA PERTANI AN		Persentase prasarana yang digunakan			
7.1	Pengemban gan Prasarana Pertanian		Persentase lahan sawah yang terdata			Pengemban gan Prasarana Pertanian		Persentase lahan sawah yang terdata			

7.1.	Pengelolaan		Lahan Pertanian	12000	Rp	Pengelolaan		Lahan Pertanian	1	Rp	
1	Lahan		Pangan	hektar	390.684.8	Lahan		Pangan	Doku	288.620.0	
	Pertanian		Berkelanjutan/LP2B		00	Pertanian		Berkelanjutan/LP2B	men	00	
	Pangan		,			Pangan		,			
	Berkelanjut		Kawasan Pertanian			Berkelanjut		Kawasan Pertanian			
	an/LP2B,		Pangan			an/LP2B,		Pangan			
	Kawasan		Berkelanjutan/KP2			Kawasan		Berkelanjutan/KP2			
	Pertanian		B dan			Pertanian		B dan			
	Pangan		Lahan Cadangan			Pangan		Lahan Cadangan			
	Berkelanjut		Pertanian Pangan			Berkelanjut		Pertanian Pangan			
	an/KP2B		Berkelanjutan/LCP2			an/KP2B		Berkelanjutan/LCP2			
	dan		B yang			dan		B yang			
	Lahan		Dikelola			Lahan		Dikelola			
	Cadangan					Cadangan					
	Pertanian					Pertanian					
	Pangan					Pangan					
	Berkelanjut					Berkelanjut					
	an/LCP2B					an/LCP2B					

7.1. .2	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 kali	Rp 226.270.0 00	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 kali	Rp 98.076.00 0	
7.2	Pembangu nan Prasarana Pertanian		Persentase luas sawah yang terairi			Pembangu nan Prasarana Pertanian		Persentase luas sawah yang terairi			
7.2. 1	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	5 Unit	Rp 481.289.6 00	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	3 Unit	Rp 113.602.1 00	

7.2. 2	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaan n Embung Pertanian		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Rp 576.112.5 00	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaan n Embung Pertanian		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		Rp -	
7.2. 3	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaan n Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Rp 568.536.6 50	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaan n Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	Rp 1.000.000. 000	
7.2. 4	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaan		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	Rp 600.000.0 00	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaan		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		Rp -	

	n DAM Parit					n DAM Parit					
7.2. 5	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungn ya		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	Rp 600.000.0 00	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungn ya		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		Rp -	

7.2. 6	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 unit	Rp 1.000.000. 000	Pembangun an, Rehabilitasi dan Pemeliharaa n Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	Rp 1.929.023. 500	
8	PROGRA M PENGEND ALIAN DAN PENANGG ULANGAN BENCANA PERTANI AN		Persentase Luas lahan yang terkena bencana			PROGRA M PENGEND ALIAN DAN PENANGG ULANGAN BENCANA PERTANI AN		Persentase Luas lahan yang terkena bencana			

8.1	Pengendali an dan Penanggula ngan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			Pengendali an dan Penanggula ngan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			
8.1. 1	Pengendalia n Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura , dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2000 ha	Rp 130.000.0 00	Pengendalia n Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura , dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1700 ha	Rp 276.450.5 00	

8.1.2	Penanggula ngan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan, Pternakan dan Kesehatan Hewan		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pternakan dan Kesehatan Hewan	1000 ha	Rp 23.940.00 0	Penanggula ngan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura , Perkebunan, Pternakan dan Kesehatan Hewan		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pternakan dan Kesehatan Hewan	1000 ha	Rp 23.900.00 0	
9	PROGRA M PENYULU HAN PERTANI		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan			PROGRA M PENYULU HAN PERTANI		Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan			

	AN					AN					
9.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian			
9.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 orang	Rp 43.500.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 orang	Rp 352.735.000	

9.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 kelompok	Rp 149.700.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 kelompok	Rp 575.200.000	
9.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	28 BPP	Rp 381.900.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	28 BPP	Rp 1.134.066.000	

9.1.4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	-	Rp -	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	24 kali	Rp 456.647.000	
	TOTAL				Rp 46.297.823.005					Rp 37.442.440.659	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan Sub kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (berupa proposal) maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pelaksanaan musrenbangtan, hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan yang dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Namun demikian dalam penyusunan program dan kegiatan tersebut dengan tetap memperhatikan skala prioritas.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada table T-C.32. Dari table tersebut kita peroleh data bahwa usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk tahun 2024 ada 6 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian (P2L). Kegiatan ini berupa pembinaan dan pemberian bantuan dalam pembangunan kebun bibit, demplot dan pakarangan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di 2 lokasi yaitu kecamatan Putra Rumbia dan Anak Ratu Aji. Kegiatan kedua yaitu pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasaranan pertanian lainnya. Kegiatan ini akan dilakukan di Kecamatan Seputih Surabaya, Bekri, dan Kota Gajah dengan jumlah volume 5 unit.

T`-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/	Catatan
			Kinerja	Volume	
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (P2L)	Putra Rumbia, Anak Ratu Aji	Terlaksananya peningkatan pendampingan sarana produksi pertanian utama	2 Unit	
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Seputih Surabaya, Bekri, Kota Gajah	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	5 Unit	
3	Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi Usaha Tani	Trimurjo, Gunung Sugih	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 Unit	
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Bekri, Anak Tuha, Padangratu, Kota Gajah, Seputih Surabaya, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	10 Unit	

5	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Bumi Nabung, Seputih Surabaya, Anak Ratu Aji, Bandar Surabaya, Terbanggi Besar, Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Sendang Agung	Terbentuknya Kebun Kolektif di 39 KWT, Meningkatnya Produksi Padi di 8 Kelompok Tani Penerima Bantuan, Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Tani Penerima Bantuan di Kampung Sendang Asih Kecamatan Sendang Agung	46 Paket/Kelompok di 8 Kecamatan	Bumi Nabung (10 Klp), Sept. Surabaya (1 Klp), Anak Ratu Aji (10 Klp), Bdr Surabaya (9 Klp), Terb. Besar (1 Klp) Trimurjo (5 Klp), Bumi Ratu Nuban (3 Klp), Sendang Agung (7 Klp)
6	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (DAK)	BPP Terbanggi Besar, BPP Seputih Banyak	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung BPP	2 Paket	Belanja Alat/Bahan, Belanja Jasa Konsultasi, Belanja Modal

Kegiatan ketiga yaitu pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi usaha tani dengan jumlah jaringan irigasi usaha tani yang akan dilakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sebanyak 2 unit yang berlokasi di Kecamatan Trimurjo dan Gunung Sugih. Kegiatan Keempat yaitu Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani dengan jumlah jalan usaha tani yang akan dibangun, direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 10 unit yang berlokasi di Kecamatan Bekri, Anak Tuha, Padang Ratu, Kota Gajah, Seputih Surabaya, Bumi Ratu Nuban, dan Trimurjo. Kegiatan kelima yaitu pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa. Kegiatan ini memiliki volume 46 paket yang akan dibagikan di Kecamatan Bumi Nabung, Seputih Surabaya, Anak Ratu Aji, Bandar Surabaya, Terbanggi Besar, Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, dan Sendang Agung. Kegiatan Keenam yaitu penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang akan dilakukan di BPP Terbanggi Besar dan BPP Seputih Banyak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Maka sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah (1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri, (2) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian Nasional, (3) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional, (4) Termanfaatkannya Inovasi dan Teknologi Pertanian, (5) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan, (6) Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Tanaman serta Penyakit Pada Hewan, (7) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional, (8) Terselenggaranya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima, serta (9) Terselenggaranya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian, (8) penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (9) peningkatan dukungan perkarantina, (10) peningkatan dukungan inovasi dan teknologi, (11) pelayanan informasi publik, (13) pengelolaan regulasi, (14) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, (15) pengelolaan perencanaan, (16) penataan dan penguatan organisasi, (17) Pengelolaan sistem pengawasan.

Visi Kementerian Pertanian

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus dipedomani oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian Pertanian. Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024 adalah : Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2020-2024 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman

pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.

2. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
3. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2026).

Telaah renstra Kementerian Pertanian RI menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah telah sejalan dengan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung. Permasalahan yang teridentifikasi dari telaahan ini adalah adanya perbedaan struktur organisasi unit kerja yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung dan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.

Selain itu, secara umum permasalahan yang teridentifikasi dari telaah renstra Kementerian Pertanian RI dan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
2. Adanya ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada pemerintah pusat
3. Ketidakstabilan perekonomian nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan target pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan sebelumnya dan bersifat kuantitatif (terukur). Sedangkan pencapaian target ini merupakan ukuran penilaian keberhasilan dari hasil kinerja faktor kunci keberhasilan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. Tujuan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 8. Tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Tahun 2023

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
				2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menjaga Ketersediaan Pangan Masyarakat	Peningkatan ketersediaan pangan yang beragam	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	385,87	391,65
2	Terwujudnya Kontribusi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	a. Meningkatkan Produksi komoditas utama pangan (Padi)	Jumlah Produksi Komoditas Utama Pangan (Padi) ton	602,591	606,135
		b. Meningkatkan Produksi Komoditas Utama Horti (Cabai)	Jumlah Produksi Komoditas Utama pangan (Cabai) ton	4,112	4,153
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	B

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
				2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perangkat Daerah			
4	Meningkatnya Tingkat Kepuasan Pelayanan Pemerintah	Meningkatnya fasilitas penunjang kesekretariatan	Nilai	79	80

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka seluruh nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura telah melaksanakan proses “pemetaan” sebagaimana telah diatur dalam Kepmendagri tersebut.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa pada Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tahun 2023 akan melaksanakan 9 (sembilan) Program terdiri dari 17 (tujuh belas) subkegiatan dan 51 (lima puluh satu) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.442.440.659. Secara garis besar kegiatan-kegiatan yang hendak dilaksanakan tertuang dalam Tabel T-C.33 Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025

Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun penyebaran lokasi sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya tersebar merata keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan terfokus pada Gapoktan, kelompok tani, dan kelompok wanita tani.

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Keg iatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi	Target Capaia n Kinerja	Kebutuha n Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
2	0	2			PROGRAM PENGELOLAA N SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN	Persentase Kampung yang telah memiliki lambung pangan masyarakat	Kab Lampung Tengah	90%	3.162.000. 000	Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi		95%	4.480.756. 000	

					KEMANDIRIA N PANGAN					Umum (DAU)			
2	0	2	2.		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang disediakan	Kab Lampung Tengah	90%	3.162.000. 000	Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU)		95%	4.480.756. 000
2	0	2	2.	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Kab Lampung Tengah	3	3.000.000. 000	Dana Alokasi Khusus (DAK)		4	4.000.000. 000

2	0	2	2.	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab Lampung Tengah	12 Kecama tan	162.000.00 0	Dana Alokasi Umum(DAU)		14 Kecama tan	480.756.0 00
2	9	0	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan (beras)	Kab Lampung Tengah		1.453.900. 000	Dana Alokasi Umum(DAU)			1.830.600. 000

2	9	0	2.		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	Kab Lampung Tengah	-	542.900.000	Dana Alokasi Umum(DAU)			790.000.000
2	9	0	2.	0	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab Lampung Tengah	1 dokumen	69.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		1 dokumen	255.000.000

2	9	0	2.	0	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab Lampung Tengah	7 Kecamatan	135.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		8 Kecamatan	155.000.000
2	9	0	2.	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab Lampung Tengah	5 kali	62.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		7 kali	72.500.000
2	9	0	2.	0	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab Lampung Tengah	15 lokasi	95.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		15 lokasi	105.000.000

2	9	0	2.	0	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Kab Lampung Tengah	40 orang	120.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		45 orang	130.500.000
2	9	0	2.	0	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab Lampung Tengah	3 unit	61.900.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		4 paket	72.000.000
2	9	0	2.		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan	Jumlah CCP (Cadangan Pangan	Kab Lampung Tengah	-	304.000.000	Dana Alokasi			342.000.000

					Pangan Kabupaten/Kota	Pemerintah) yang disediakan (Beras)				Umum(DAU)			
2	9	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah	7 kali	81.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		12 kali	84.500.000
2	9	0	2.	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	jumlah rencana kebutuhan pangan lokal yang disusun	Kab Lampung Tengah	14 kali	93.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		14 kali	107.500.000

2	9	0	2.	0	Pengadaan	Jumlah	Kab	30 ton		Dana		30 ton	
		3	02	3	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Lampung Tengah		130.000.00 0	Alokasi Umum(DAU)			150.000.0 00
2	9	0	2.		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Persentase penentuan Harga Minimum Daerah pangan Lokal	Kab Lampung Tengah	8 kali	198.500.00 0	Dana Alokasi Umum(DAU)			210.800.0 00
2	9	0	2.	0	Koordinasi dan	Jumlah	Kab	8 kali		Dana		14 kali	
		3	03	1	Sinkronisasi Penentuan Harga	Koordinasi dan	Lampung Tengah		198.500.00 0	Alokasi			210.800.0 00

					Minimum Pangan Pokok Lokal	Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				Umum(DAU)			
2	9	0	2.		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pelaksanaan Target Konsumsi pangan perkapita pertahun	Kab Lampung Tengah	-	408.500.000	Dana Alokasi Umum(DAU)			487.800.000
2	9	0	2.	0	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab Lampung Tengah	1 dokume n	192.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		1 dokume n	215.700.000

2	9	0	2.	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab Lampung Tengah	3 kelompok	125.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		4 kelompok	157.600.000
2	9	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per	Kab Lampung Tengah	10 kali	91.500.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		12 kali	114.500.000

						Kapita Per Tahun							
2	9	0			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	Kab Lampung Tengah	100%	130.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)			150.750.000
2	9	0	2.		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan yang disusun	Kab Lampung Tengah	1 dokum en	45.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)			60.000.000
2	9	0	2.	0	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan	Kab Lampung Tengah	1 dokume n	45.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		1 dokume n	60.000.000

						Pangan yang Dimutahirkan							
2	9	0	2.		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Rentan Rawan Pangan yang ditangani	Kab Lampung Tengah	10 kali	85.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)			90.750.000
2	9	0	2.	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah	10 kali	85.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		12 kalo	90.750.000

2	9	0			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Kampung Rentan Rawan Pangan yang mendapat penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Kab Lampung Tengah	-	184.500.00 0	Dana Alokasi Umum(DAU)			216.900.0 00
2	9	0	2.		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan	Kab Lampung Tengah	-	184.500.00 0	Dana Alokasi Umum(DAU)			216.900.0 00

						keamanan pangan							
2	9	0	2.	0	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab Lampung Tengah	10 kelompok	42.500.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		12 kelompok	45.000.000
2	9	0	2.	0	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Kab Lampung Tengah	12 kecamatan	52.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		12 kecamatan	65.400.000

						Kabupaten/Kota							
2	9	0	2.	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Lampung Tengah	10 lokasi	90.000.000	Dana Alokasi Umum(DAU)		12 lokasi	106.500.000
3					Urusan Pilihan								

3	2				Pertanian								
	7												
3	2				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatny a Persentase Ketersediaan Penunjnag Urusan Pemerintahan Daerah di OPD							
	7												
3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN				412.956.76 4				968.680.1 22
	7	2											
3	2	0	2.		Pengawasan Penggunaan				412.956.76 4				968.680.1 22
	7	2	01										

					Sarana Pertanian								
3	2	0	2.	0	Pengawasan	Jumlah	28	12	59.072.000	APBD		28	300.000
	7	3	01	1	Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kecamatan	laporan					
3	2	0	2.	0	Pendampingan	Jumlah	28	90 kali	353.884.76	APBD		96 kali	968.380.1
	7	4	01	2	Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan SaranaPenduk ung Pertanian	Kecamatan		4				22

3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN					5.390.430. 000				4.478.244. 400
3	2	0	01		Pengembangan Prasarana Pertanian					775.840.00 0				616.954.8 00
3	2	0	01	0	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/	Anak ratu aji, Anak tuha,Bangu n rejo,Bekri,P adang ratu,Pubian, Selagai lingga,Sepu	1 dokume n	290.000.00 0	APBD		#####		390.684.8 00

					Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B	KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola (satuan Dokumen)	tih agung,Send ang agung						
3	2	0	01	0	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Kabupaten Lampung Tengah	1 dokume n	380.000.00 0	APBN		-	-

3	2	0	01	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Kabupaten Lampung Tengah	20 laporan	105.840.000	APBD		5 kali	226.270.000
3	2	0	02		Pembangunan Prasarana Pertanian				4.614.590.000				3.861.289.600
3	2	0	02	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Seputih banyak, Anak ratu aji, Padang ratu	5 unit	124.600.000	DAK, APBN		5 unit	481.289.600

3	2	0	02	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Seputih agung, Seputih Raman, Seputih Mataram	1 unit	370.210.00 0	DAK, APBN		1 unit	120.000.0 00
3	2	0	02	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Padang ratu, Selagai lingga	7	1.400.000. 000	DAK,		3 unit	300.000.0 00
3	2	0	02	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Padang Ratu.	1 unit	619.780.00 0	DAK		1 unit	120.000.0 00

3	2	0	02	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah <i>Long Storage</i> yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Seputih raman, Seputih Mataram, Bandar surabaya, Bekri, Anak ratu aji	5 unit	2.100.000.000	APBD		5 unit	440.000.000
3	2	0	02	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	BPP Punggur, BPP Seputih Banyak & BPP Bandar Mataram	3 BPP	0	DAK, APBN		4 BPP	2.400.000.000

3	2	0			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggul angan bencana			308.940.00 0				
3	2	0	2	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan penanggulang an bencana pertanian			308.940.00 0				

3	2	0	01	0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	kecamatan	1700 ha	285.000.000	APBD		2000 ha	96.250.000
3	2	0	01	0	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,	kecamatan	1200 ha	0	APBD		1324 ha	39.000.000

					Hortikultura, dan Perkebunan	Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani							
3	2	0	01	0	Penanggulangan pasca bencana alam bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kesehatan hewan	Jumlah Penanggulang an Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	kecamatan	4 kali	23.940.000	APBD		4 kali	23.940.00 0

3	2	0			Program Penyuluhan Pertanian	Presentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh			2.616.700. 000				3.834.132. 929
3	2	0	1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian			2.616.700. 000				
3	2	0	01	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	kabupaten	50 orang	375.000.00 0	APBD		50 orang	36.554.10 0

3	2	0	01	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan	200 kelompok	585.000.000	APBD		200 kelompok	960.346.750
3	2	0	01	0	Penyediaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kecamatan	28 Kecamatan	1.200.000.000	DAK, APBN		28 Kecamatan	240.548.000
3	2	0	01	0	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	-	-	-	-		-	-

3	2	0	01	0	Pembentukan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupaten	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	kecamatan	24 kali	456.700.00 0	LOAN, APBN		24 kali	2.596.684. 079
3	2	0			Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.810.000				10.810.00 0
3	2	0	01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	kabupaten	2 dokume n	4.680.000	APBD		2 dokume n	4.680.000

						Daerah yang Disusun							
3	2	0	01	0	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kabupaten	1 dokume n	4.030.000	APBD		1 dokume n	4.030.000
3	2	0	01	0	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	kabupaten	12 kali	2.100.000	APBD		12 kali	2.100.000

3	2	0			Program Administrasi Keungan Perangkat Daerah				28.740.152 .689				20.331.55 8.931
3	2	0	02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji pegawai	kabupaten	12 bulan	25.184.976 .689	APBD		12 bulan	17.157.10 9.931
3	2	0	02	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pelayanan jasa administrasi keuangan	kabupaten	3 jenis	3.550.976. 000	APBD		3 jenis	3.173.252. 000
3	2	0	02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulan/semes teran SKPD	kabupaten	6 dokume n	4.200.000	APBD		6 dokume n	1.197.000

3	2	0			Program Administrasi Umum Perangkat Daerah				583.575.70 0				570.846.5 00
3	2	0	06	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	kabupaten	3 jenis	3.600.000	APBD		3 jenis	2.297.400
3	2	0	06	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	kabupaten	2 jenis	171.040.70 0	APBD		2 jenis	171.040.7 00
3	2	0	06	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	kabupaten	5 jenis	29.500.000	APBD		5 jenis	18.073.40 0

3	2	0	06	0	Penyediaan Bahan	Jumlah jenis	kabupaten	3 jenis	40.420.000	APBD		3 jenis	40.420.00
	7	6		6	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bahan bacaan yang tersedia							0
3	2	0	06	0	Penyelenggaraan	jumlah	kabupaten	12 kali	339.015.00	APBD		12 kali	339.015.0
	7	6		9	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			0				00
3	2	0			Program				405.000.00				285.000.0
	7	8			penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				0				00

3	2	0	08	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi dan listrik yang tersedia	kabupaten	12 bulan	405.000.000	APBD		12 bulan	285.000.000
3	2	0			Program pemeliharaan milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				189.630.000				155.960.000
3	2	0	09	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	kabupaten	1 unit	41.670.000	APBD		1 unit	41.670.000

3	2	0	09	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	kabupaten	2 unit	107.160.000	APBD		2 unit	73.490.000
3	2	0	09	0	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	kabupaten	60 unit	40.800.000	APBD		60 unit	40.800.000
TOTAL									43.588.595.153				37.314.238.882

Bab IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2022 maupun program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka ditetapkan prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2022 yaitu

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman, dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Memperhatikan prioritas pembangunan yang terdapat pada RKPD tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang memiliki fungsi wajib bukan pelayan dasar berada pada prioritas ke-3 yaitu Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan. Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mencakup 9 (sembilan) Program terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan dan 51 (lima puluh satu), yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

- **Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten**
 - a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik

- c. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
- d. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**
 - a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - d. Pemantauan, Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
 - f. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten
 - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
 - c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten
- **Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
- **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan**
 - a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Pertahun

3. Program Penanganan Rawan Pangan

- **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten
 - b. Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten**
 - a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten
 - b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah
 - c. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi
b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

- Pembangunan Prasarana Pertanian

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya
e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

9. Program Penyuluhan Pertanian

- Pelaksana Penyuluhan Pertanian

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

Program Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Bab V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024 ini merupakan salah satu perangkat yang sangat bermanfaat bagi perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Rencana Kerja 2024 ini memuat rencana program dan kegiatan selain sebagai bentuk komitmen tahunan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura juga merupakan dasar bagi penerapan anggaran berbasis kinerja dan titik tolak bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2025 yang akan datang.

Rencana Kerja 2024 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kementerian Pertanian RI, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah serta berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

Program dan kegiatan yang telah direncanakan ini, tentu belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan yang berkembang serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah. Terutama berkenaan dengan keterbatasan anggaran sehingga diperlukan skala prioritas dalam pelaksanaannya. Dengan adanya dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2024 ini semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang sudah menjadi tekad seluruh komponen masyarakat.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini adalah Perangkat Daerah yang mempunyai output meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan ketahanan pangan dan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk penentuan kebijakan Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan di Perangkat Daerah yang sudah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 diharapkan tetap bisa berjalan dengan optimal. Untuk itu dalam penyusunan RKA, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban perlu dilakukan pengendalian secara intensif dan terus menerus melalui koordinasi, SPIP dan pengawasan. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di perangkat daerah, harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya.
- b. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

5.3 Rencana Tindaklanjut

Dalam rangka mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2023, rencana tindak lanjut merupakan faktor penting yang menjadi dasar pelaksanaan Renja tersebut. Rencana tindak lanjut tersebut antara lain :

- a) Dalam rangka menjaga kesinambungan dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, maka perlu diikuti dengan kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- b) Membuka ruang terhadap peran serta stakeholder dalam proses perencanaan sehingga transparansi akan lebih terwujud;
- c) Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM ASN Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja ASN.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Gunung Sugih, 24 Januari 2023
KEPALA DINAS

JUMALI, S.P., M. IP
NIP. 19650930 199403 1 006